



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSSALIM

2. Jabatan : KEPALA BALAI

3. NHK : 887026

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.105.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/270 m2 di KAB / KOTA

KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

2. Tanah Seluas 5.300 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN

Rp. 350.000.000

3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BARRU, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

4. Tanah Seluas 5.500 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

5. Tanah Seluas 15.600 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

6. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI

Rp. 150.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI

Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	40.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	145.440.318
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.447.440.318
III. HUTANG	Rp.	113.040.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.334.400.318

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.